

Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi

Dian Nur Afifah¹, Ana Kumalasari², Musta'ana

Universitas Bojonegoro

dianafifah0101@gmail.com, anakumala30@gmail.com, anarochim@gmail.com

ABSTRACT

Inclusive education is education that provides opportunities for students with special needs to participate in learning with general students. This research describes the strategy of the Bojonegoro Education Office for implementing inclusive schools. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the research show that implementation of inclusive education in Bojonegoro has not run maximally because several problems occur, such as there is still resistance from communities towards children with special needs; there are limited competent special guidance teachers; learning curriculum still same as general students; and easily accessible learning media still less than optimal. However, on the other hand, the strategy of the Education Office in implementing inclusive education in Bojonegoro can be said to be quite good, this can be seen from the readiness of the Education Office to provide facilities needed by students with special needs and the existence of BOS funds helps meet the needs of students with special needs. Apart from that, there is also the ULD Trandiksus program which will be launched by the Ministry through BPPMP, in which case the Education Office will also provide supporting facilities for every inclusive education activity.

Keywords: *strategy, education service, inclusive school*

ABSTRAK

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberi kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran bersama siswa lain dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan sekolah inklusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan review dari berbagai sumber dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan maksimal karena terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, seperti: masih ada penolakan dari sebagian orang tua/ masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, minimnya jumlah Guru Pembimbing Khusus yang berkompeten, kurikulum pembelajaran yang masih sama dengan siswa umum dan media pembelajaran yang mudah diakses masih kurang optimal. Namun di sisi lain strategi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari kesiapan Dinas Pendidikan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa ABK dan adanya dana BOS turut membantu memenuhi keperluan siswa ABK setiap harinya. Selain itu, juga terdapat program ULD Trandiksus yang akan diluncurkan oleh Kementerian melalui BPPMP, yang mana dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten Bojonegoro turut memberikan fasilitas penunjang untuk setiap kegiatan pendidikan inklusi.

Kata kunci: strategi, dinas pendidikan, sekolah inklusi

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, manusia telah belajar tentang dirinya dan lingkungannya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan alat utama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas pada generasi muda. Menurut Pristiwanti et al., (2022), Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai kebutuhan perkembangan kehidupan anak untuk memungkinkan mereka menjadi manusia dan mencapai keamanan dan kesejahteraan maksimal sebagai anggota masyarakat. Di Indonesia, pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap orang. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang merupakan hak bagi seluruh penduduk Indonesia. Pendidikan inklusif memberikan ABK kesempatan seluas-luasnya untuk bersama dengan siswa lain berpartisipasi dalam layanan pendidikan yang setara. Selain itu, Anak Berkebutuhan Khusus dan anak biasa juga dapat berinteraksi secara alami sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian Kalalo et al., (2022 dalam Usup et al., 2023), data statistik mengenai disabilitas anak usia 5-19 tahun yaitu 3,3%. Sementara itu, total populasi pada usia tersebut (2021) yaitu 66,6 juta jiwa. Jadi, jumlah anak usia 5-19 tahun dengan keterbatasan kemampuan sekitar 2.197.833. Kemudian, data Kemendikbud per Agustus 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Luar Biasa atau inklusif terdapat 269.398 anak. Jadi, total keseluruhan ABK yang mengikuti pendidikan formal hanyalah 12,26%. Berarti, jumlah yang ada masih terlalu sedikit dari jumlah yang harus dilayani.

Salah satu tempat yang disediakan pemerintah untuk bisa mengakses pendidikan inklusif adalah sekolah inklusif. Sekolah inklusif memungkinkan siswa berkebutuhan khusus menerima pendidikan berbasis kebutuhan dengan akomodasi yang mendukung. Anak Berkebutuhan Khusus dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan anak reguler melalui pendidikan inklusif di sekolah inklusif. PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa mewajibkan pemerintah kabupaten/ kota untuk menunjuk setidaknya satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu sekolah menengah atas untuk menyelenggarakan pendidikan melalui sistem inklusif, hal ini mengharuskan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan berkebutuhan khusus untuk siswa (Indarta, 2020). Mulyah & Khoiri (2020) menunjukkan bahwa Indonesia selama ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusif mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Pendidikan inklusif harus dimulai pada jenjang pendidikan paling awal, yaitu jenjang PAUD. Hal ini dikarenakan anak dapat menerima rangsangan yang jauh lebih baik sejak usia dini dibandingkan pada usia yang lebih tua (usia sekolah dasar).

Berdasarkan pengamatan peneliti, rata-rata guru kelas di sekolah inklusif masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip, aturan, dan prosedur pembelajaran di kelas inklusif. Namun dalam hal interaksi sosial, siswa berkebutuhan khusus diasumsikan baik dalam komunikasi verbal dan non verbal. Saat menangani permasalahan perilaku pada anak berkebutuhan khusus, sebagian besar guru tidak memberikan intervensi ringan yang sesuai. Hal ini sesuai dengan penelitian Sutras (2019), yang menyatakan bahwa bentuk *feedback* berupa pujian, motivasi, dan komentar positif yang memberikan dukungan kepada anak. Faktor penyebab rendahnya jumlah ABK yang bersekolah: 1) stigma orang tua siswa yang belum bisa menerima sepenuhnya keberadaan ABK; dan 2) persepsi masyarakat bahwa ABK tidak mampu dan tidak perlu bersekolah; 3) belum ada bukti siswa SLB benar-benar berkarya/ berprestasi; dan 4) kepercayaan yang rendah dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan bagi ABK. Melihat permasalahan tersebut tentunya diperlukan strategi yang tepat untuk menanganinya. Strategi berguna sebagai suatu sistem yang memungkinkan kekuasaan dan sumber daya yang ada diatur melalui lembaga-lembaga publik (pemerintah) untuk kepentingan-kepentingan umum. Geof Mulgan (dalam (Christian, 2020) menguraikan ke dalam lima indikator: *Purposes* (Tujuan); *Environment* (Lingkungan); *Direction* (Pengarahan); *Action* (Tindakan); dan *Learning* (Pembelajaran).

Menurut Collins dkk., (2019 dalam Juntak et al., 2023) dalam penyelenggaraan sekolah inklusif adapun hambatan yang terjadi seperti kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pendidikan inklusif. Banyak tenaga pengajar belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai pembelajaran inklusif. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja belajar siswa ABK. Selain itu, menurut Riyadi (2021 dalam Juntak et al., 2023), minimnya sarana penunjang juga menjadi kendala dalam penerapan pendidikan inklusif. Mayoritas sekolah-sekolah tidak disediakan fasilitas seperti: jalan landai dan toilet bagi siswa berkebutuhan khusus. Kemudian, alat bantu dengar dan peralatan lain untuk menunjang pendidikan inklusif juga minim. Terkadang terdapat anggapan negatif tentang kemampuan anak, yang dapat mempengaruhi mereka dalam mengikuti pendidikan inklusif. Upaya yang lebih besar diperlukan untuk mengubah persepsi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi bidang pendidikan memiliki peran dan tugas penting dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai fasilitator memiliki tugas untuk menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam sekolah inklusi, mulai dari merencanakan program hingga menjalin kerja sama dengan instansi lain. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak menerima perawatan dan dukungan terbaik sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan sekolah inklusi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Menurut Creswell (2016), dalam buku *Research Design*, metode penelitian kualitatif adalah suatu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna-makna yang dilekatkan oleh personal atau sekelompok orang yang berbeda terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan mengenai gambaran suatu peristiwa secara menyeluruh dan mendalam mengenai strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Fokus penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Geoff Mulgan (dalam (Christian, 2020) yang menguraikan ke dalam lima indikator: *Purposes* (Tujuan); *Environment* (Lingkungan); *Direction* (Pengarahan); *Action* (Tindakan); dan *Learning* (Pembelajaran).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan kajian terhadap berbagai sumber dokumenter seperti buku, jurnal, dan dokumen yang memuat informasi relevan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan. Menurut Sugiyono (2019 dalam Ani et al., 2021), *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan aspek tertentu. Artinya penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dikembangkan oleh peneliti. Teknik *purposive sampling* mengharuskan peneliti mengevaluasi populasi yang digunakan dan mengecualikan populasi yang tidak layak dijadikan sampel. Penelitian *purposive sampling* dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung tujuan penelitian (Patton, M, 1990 dalam Lenaini, 2021). Dalam penelitian ini terdapat tiga informan di antaranya yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, dan Analis Kurikulum dan Pembelajaran.

Data penelitian ini dianalisis dengan metode induktif dan peneliti juga menggunakan analisis data Miles dan Huberman (Susanti & Wahyudi, 2018), data tersebut diolah dengan cara mereduksi data terlebih dahulu, yang mana berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, sehingga membantu peneliti fokus pada temuan. Lalu, merepresentasikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang tersebut untuk menarik kesimpulan dan mengambil Tindakan, serta melakukan validasi data dengan Teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Inklusi di Kabupaten Bojonegoro

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses belajar mengajar bersama siswa lain dalam lingkungan pendidikan. Buku Pedoman Pendidikan Inklusif mengidentifikasi tiga tantangan terhadap keberhasilan penerapan pendidikan inklusif, di antaranya yaitu : memperluas akses agar seluruh sekolah tanpa terkecuali dapat menampung siswa berkebutuhan khusus, menyediakan lingkungan yang

tepat, dalam hal ini dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pendanaan dan akomodasi dalam kurikulum, dan penyiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala DISDIK Kabupaten Bojonegoro yang mengatakan bahwa "kebijakan pendidikan inklusi sesuai dengan tujuan/ himbauan pemerintah yang memperbolehkan siswa berkebutuhan khusus yang dulunya hanya diterima di sekolah luar biasa, untuk sekarang aturannya sekolah negeri SMP umum/ SD umum bisa menerima siswa berkebutuhan khusus. Lalu, informan juga menambahkan, jadi tergantung orang tuanya, ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah khusus/ SLB, tetapi juga ada orang tua yang tidak ingin anaknya disekolahkan di sekolah khusus, karena dia merasa anaknya bisa berbaur dengan anak-anak normal, dan kenapa kebijakannya seperti itu, karena terkadang anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan ikut dengan teman-temannya yang normal dia tidak merasa mempunyai kekurangan. Berdasarkan pernyataan informan tersebut bahwa keputusan untuk mengikuti pendidikan di sekolah inklusi ataupun sekolah khusus/ SLB tergantung pada keputusan orang tua ABK. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi keberadaan sekolah inklusi jika memang dibutuhkan oleh Anak Berkebutuhan Khusus, jadi sifatnya tidak memaksa. Jadi dalam hal ini perbedaan antara SLB dengan sekolah inklusi yaitu jika SLB terdapat kekhususan untuk anak ABK saja, sedangkan sekolah inklusi ditujukan untuk anak-anak umum dan ABK.

Dalam penerapan pendidikan inklusif di Kabupaten Bojonegoro ini, Dinas Pendidikan sebagai fasilitator bertugas memperluas akses agar sekolah-sekolah di Kabupaten Bojonegoro tanpa terkecuali dapat menampung siswa berkebutuhan khusus. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat menyiapkan sekolah-sekolah inklusif mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan mengenai jumlah ABK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023, terdapat 44 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yang mana data tersebut mayoritas diisi oleh sekolah dasar dengan jumlah ABK yang berbeda-beda mulai dari 1 anak hingga 4 anak per sekolah, jadi total keseluruhan yaitu 69 anak. Maka dari itu, banyaknya jumlah ABK di Kabupaten Bojonegoro perlunya keberadaan sekolah inklusif. Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyiapkan pendanaan dan akomodasi bagi sekolah inklusif. Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa Dinas Pendidikan memperhatikan sarana prasarana dan kurikulum pembelajaran yang dibutuhkan ABK. Sarana dan prasarana yang memadai tentunya sangat dibutuhkan oleh ABK. Selain sarana dan prasarana, ABK juga membutuhkan metode pembelajaran atau kurikulum pembelajaran yang sesuai.

Tabel 1. Data Jumlah ABK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023

No.	Nama Sekolah	Jumlah ABK
1	SDN Mojodeso II	1
2	SDN Sumuragung Baureno	1
3	SDN Katur I Gayam	1
4	SDN Banaran Malo	2
5	SDN Nganti II Ngraho	1
6	SDK Maranatha Kedungadem	1
7	SDN Besah II Kasiman	1
8	SDN Kalitidu II	4
9	SDN Malingmati II	4
10	SDN Megale I Kedungadem	1
11	SDN Napis I Tambakrejo	1
12	SDN Drokilo II Kedungadem	1
13	SDN Baureno III	3
14	SDN Klino I Sekar	1
15	SDN Jatimulyo I Tambakrejo	2
16	SDN Pucangarum I Baureno	1
17	SDN Mojosari Kepohbaru	1
18	SDN Grebegan Kalitidu	1
19	SDN Tembeling I Kasiman	1
20	SDN Jamberejo III Kedungadem	1
21	SDN Panjang III Kedungadem	1
22	SDN Gajah II Baureno	1
23	SDN Kuniran II Purwosari	1
24	SDN Ngelo I Margomulyo	3
25	SDN Kalangan III Margomulyo	1
26	SDN Kalirejo II	4
27	SDN Pojok Purwosari	2
28	SDN Sidorejo II Padangan	1
29	SDN Tanjungharjo I Kapas	3
30	SDN Kalangan II Margomulyo	1
31	SDN Semawot Sukosewu	1
32	SDN Sukorejo III Tambakrejo	1
33	SDN Sengon I Ngambon	1
34	SDN Kalangan III Margomulyo	1
35	SDN Ngraho	2
36	SDN Kaliombo I Purwosari	2
37	SDN Temayang I	1
38	SDN Kedungprimpen Kanor	1
39	SDN Tengger Ngasem	1
40	SDN Wadang II Ngasem	2

41	SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro	3
42	SMPN 1 Gondang	1
43	SMPN 1 Tambakrejo	1
44	(tidak diketahui)	3
TOTAL		69

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi

Geoff Mulgan mengidentifikasi lima strategi sebagai sistem yang mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada melalui organisasi untuk tujuan kepentingan publik, Geof Mulgan (dalam (Christian, 2020) menguraikan ke dalam lima indikator, yaitu:

a. *Purposes* (Tujuan)

Suatu tujuan memerlukan misi dan kemampuan untuk melaksanakan dan menerapkan misi tersebut. Suatu kebijakan/ program yang diselenggarakan pemerintah tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, karena dengan adanya tujuan maka proses berjalannya kegiatan akan terarah dan terfokus pada satu tujuan yang menjadi sasaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Analis Kurikulum dan Pembelajaran DISDIK mengatakan bahwa tujuan diadakannya sekolah inklusi oleh Pemerintah adalah untuk memberikan kesempatan bagi ABK untuk dapat bersekolah di sekolah umum/ reguler. Seperti halnya pada pembahasan sebelumnya, informan juga mengatakan bahwa dengan bersekolah di sekolah umum dan bergabung dengan anak-anak normal para ABK tersebut akan merasa tidak mempunyai kekurangan, sehingga hal tersebut dapat memacu mereka untuk lebih giat belajar dan meraih prestasi.

Berkaitan dengan prestasi atau pencapaian yang didapat oleh Anak Berkebutuhan Khusus tentunya hal tersebut merupakan suatu hal yang bermakna karena tentunya tidak cukup mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Analis Kurikulum dan Pembelajaran terkait prestasi atau pencapaian ABK di sekolah inklusi kabupaten Bojonegoro, informan mengatakan bahwa belum pernah diukur, harus dilakukan asesmen bisa jadi yang berprestasi itu anak jenius. Anak jenius juga termasuk golongan anak inklusi. Tapi ada di setiap sekolah Anak Berkebutuhan Khusus dapat berprestasi contohnya siswa di SMP 7 anak penyandang tuna netra dapat juara Qori'ah. Dari pernyataan tersebut, informan mengatakan bahwa salah satu ABK yang bersekolah di SMP N 7 Bojonegoro dapat meraih prestasi dalam lomba Qori'ah. Tentunya hal tersebut mematahkan spekulasi masyarakat terhadap ABK yang tidak dapat berprestasi dan berkarya. Seharusnya masyarakat justru mendukung keberadaan ABK tanpa harus merendahkan dan meremehkan kemampuan mereka.

b. *Environment* (Lingkungan)

Indikator lingkungan salah satunya dapat diukur berdasarkan perubahan pada kondisi sekitar. Adanya kebijakan sekolah inklusi khususnya di kabupaten Bojonegoro ini, tentunya menuai beragam pendapat dari kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DISDIK terkait adakah penolakan dari sebagian orang tua/ wali murid terhadap keberadaan ABK di sekolah inklusi, informan mengatakan bahwa jadi sebagian orang tua ada yang tidak terima bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, ada juga orang tua yang menerima unek-unek masyarakat. Sejauh ini kalau untuk di sekolah, masyarakatnya sangat menerima dengan baik. Dalam penerimaan siswa ABK di sekolah inklusi di kabupaten Bojonegoro ini tidak ada kriteria khusus. Seperti penuturan informan yang mengatakan bahwa "tidak ada kriteria, jadi tuna netra, cacat tangan, IQ nya rendah, tetapi perkembangannya sangat bagus dan bisa menyesuaikan dengan teman-temannya dan diterima oleh lingkungan dan memang beberapa sekolah menerima sesuai permintaan orang tua. Tidak adanya kriteria khusus bagi ABK tentunya mempermudah ABK untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah inklusi.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, keterbatasan kemampuan yang dimiliki siswa ABK beragam mulai dari tuna daksa, tuna grahita, tuna wicara, tuna rungu, kesulitan belajar (disleksia), ADHD, *Down Syndrome*, dan autisme. Keberadaan ABK di lingkungan masyarakat sangat membutuhkan bantuan dan dukungan yang positif agar dapat membantu kondisi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan. Sebagai masyarakat tidak seharusnya merendahkan ABK karena justru akan dapat mempengaruhi kondisi mental mereka yang nantinya akan semakin memburuk.

c. *Direction* (Pengarahan)

Direction atau pengarahannya menurut Rahamawati et al., (2019) berarti mengarahkan seluruh pegawai untuk bekerja sama dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dilihat berdasarkan aspek pengarahannya (*direction*), kebijakan pemerintah daerah mengenai pendidikan inklusi di Kabupaten Bojonegoro ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan program Trandiksus (Transformasi Pendidikan Khusus). Pemerintah kabupaten Bojonegoro memberikan fasilitas penunjang untuk setiap kegiatan dari pusat yang turun ke BPPMP (Balai Besar Pendampingan Mutu Pendidikan) kemudian ke Dinas Pendidikan dan diinvestasikan ke satuan pendidikan untuk menerima Trandiksus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Analis Kurikulum dan Pembelajaran DISDIK menjelaskan bahwa "sebagai bentuk pengimbasan, jadi rapor pendidikan berwarna kuning/ merah jadi tolak ukur pendidikan ada di rapor pendidikan, iklim inklusinya bagus/ buruk. Di Bojonegoro ini, Dinas Pendidikan mengundang 233 SD/ SMP yang rapornya berwarna kuning/ merah terus kemudian diberikan sosialisasi mengenai Trandiksus (Transformasi

Pendidikan Khusus), jadi dalam bentuk pengimbasan dari BPPMP *monitoring* yang juga didampingi oleh BPPMP Provinsi. Dalam hal ini informan juga memberikan contoh beberapa sekolah umum di Kabupaten Bojonegoro yang menyelenggarakan pendidikan inklusi seperti SDN Ngablak 2 dan SMPN 1 Dander. Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dinilai tanggap terhadap kondisi ABK. Adanya program Trandiksus diharapkan memberikan manfaat terhadap ABK.

d. *Action* (Tindakan)

Tindakan dalam suatu kebijakan dinilai sangat penting. Tindakan dibutuhkan segera jika terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan serius. Tindakan yang dilakukan tentu akan dapat mempengaruhi kondisi dan hasil maka dari itu sebisa mungkin tindakan yang diberikan haruslah yang memiliki manfaat bagi penerima tindakan. Jika ditinjau dari aspek tindakan yaitu tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait program sekolah inklusi, sebagian berjalan baik dan sebagian belum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DISDIK mengenai strategi yang diterapkan, didapat informasi bahwa selama ini belum ada kegiatan yang diterapkan, tapi secara khusus memang ada lembaga yang mengadakan kegiatan umum diperlakukan sama dan belum banyak guru khusus untuk sekolah umum penyandang disabilitas.

Maka dari itu, tindakan yang dilakukan oleh DISDIK Kabupaten Bojonegoro yaitu membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas) program Trandiksus yang mana program tersebut akan diluncurkan oleh Kementerian melalui BPPMP dalam waktu dekat untuk melaksanakan pelatihan terus menerus. Informan juga menambahkan informasi bahwa di pelatihan ini membuat ULD jadi lembaga yang terkait ada dinas Provinsi, anggota dari sekolah langsung, dan dinas terkait". Adanya tindakan Dinas Pendidikan melalui program pembentukan ULD diharapkan memberikan dampak positif bagi keberadaan ABK. Keberhasilan program tersebut tentu dapat membantu ABK dalam menerima layanan disabilitas.

e. *Learning* (Pembelajaran)

Pembelajaran merupakan dukungan yang diberikan oleh tenaga pendidik agar berlangsung proses mendapatkan ilmu, keterampilan, dan kebiasaan, serta pembentukan sikap dan keyakinan peserta didik. Dengan kata lain belajar adalah suatu proses yang membantu siswa belajar dengan baik (Djamaluddin & Wardana, 2019).

Dilihat dari aspek pembelajaran (*learning*), yaitu dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DISDIK terkait metode pembelajaran/ kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan inklusi, mengatakan bahwa "sama seperti siswa umum cuma guru harus lebih peduli dan lebih memperhatikan. Jadi, untuk kurikulum kelas 1,2,4,5 pakai kurikulum merdeka sedangkan kelas 3 dan 6 pakai kurikulum darurat. Hal tersebut berarti menandakan bahwa metode/kurikulum

pembelajaran siswa ABK harus mengikuti kurikulum siswa pada umumnya. Menurut peneliti, seharusnya ada kekhususan kurikulum pembelajaran yang diberikan kepada siswa ABK agar mereka tidak merasakan kesulitan terhadap pembelajaran yang diterima. Dikarenakan jika kurikulum pembelajaran tidak sesuai dengan kemampuan siswa ABK, ditakutkan akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar mereka yang menjadi kurang maksimal.

Dalam hal ini kendala yang dialami dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi di Kabupaten Bojonegoro yaitu: a) terbatasnya GPK dari sekian banyak sekolah; dan b) warga sekolah sulit menerima keberadaan ABK, terkadang mereka menyimpulkan bahwa ABK seharusnya masuk di SLB. Dikarenakan sekarang sudah ada pembelajaran diferensiasi harusnya semua bisa masuk. Lalu peneliti juga menanyakan kepada informan terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh ABK. Informan menjelaskan bahwa tidak ada pungutan biaya bagi ABK yang mengenyam pendidikan di sekolah inklusif, jadi semua gratis, bahkan siswa ABK mendapat dana BOS sebesar Rp. 940.000,- per tahunnya.

Dengan biaya yang gratis tentu tidak memberatkan orang tua ABK untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif dan bahkan adanya bantuan keuangan tersebut dapat membantu kebutuhan ABK yang diperlukan setiap harinya. Kebijakan pemerintah terkait dana BOS ini dapat dikatakan sangat bermanfaat untuk membantu kondisi ABK dan diharapkan kebijakan tersebut dapat terus berlanjut agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak penyandang disabilitas yang memang sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, di antaranya yaitu masih ada penolakan dari sebagian orang tua/ masyarakat terhadap ABK, terbatasnya jumlah GPK yang berkompeten, kurikulum pembelajaran yang masih sama dengan siswa umum, dan media pembelajaran yang mudah diakses masih kurang optimal. Namun di sisi lain strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari kesiapan Dinas Pendidikan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa ABK dan adanya dana BOS turut membantu memenuhi keperluan siswa ABK setiap harinya. Selain itu, juga terdapat program ULD (Unit Layanan Disabilitas) program Trandiksus (Transformasi Pendidikan Khusus) yang akan diluncurkan oleh Kementerian melalui BPPMP, yang mana dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten Bojonegoro turut memberikan fasilitas penunjang untuk setiap kegiatan pendidikan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada E-Commerce Tokopedia di Kota Manado. *663 Jurnal EMBA*, 9(2), 663–674.
- Christian, A. J. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). *Library Unikom*, 13–44.
- Creswell, J. W. (2016). Metode Penelitian. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 38–61.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Djamaluddin, A., & Wardana. (2019). Belajar dan Pembelajaran 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis. In *CV Kaaffah Learning Center*.
- Indarta, D. W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Bojonegoro. *Justitiable - Jurnal Hukum*, 3(July), 45–54.
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. In *Menteri Pendidikan Nasional RI* (Vol. 5, Issue 3, pp. 1–6).
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2020). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 05(2), 8270–8280. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.105>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1707–1715.
- Rahamawati, I. F., Sulistyningrum, C. D., & Murwaningsih, T. (2019). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. *Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 3(1), 87–99.
- Setiawan, D. (2021). Analisis Strategi Branding Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Dalam Mewujudkan Kampung Budaya

Berbasiskan Budaya Jawa. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49-58.

Susanti, D., & Wahyudi, A. (2018). Motif Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusi SDN Panjunan II Kalitidu Bojonegoro. *Core. Ac.Uk*, 6(1), 1-5.

Sutras, S. (2019). Strategi Campaign Melalui Seni Campursari "Siswo Laras Budoyo" sebagai Upaya Mengembangkan Kepedulian Masyarakat bagi Pendidikan Khusus di Kabupaten Bojonegoro. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 3(1), 11.

Usup, Madi, M. S., Hataul, S., & Satiawati, C. (2023). Pengaruh Teman Sejawat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(02), 196-204.